Laporan Riset Analitik: Triangulasi Destruksional, Hegemoni Pengetahuan Kolonial, dan Penghapusan Sejarah Maritim Nusantara (1871–1935)

Pendahuluan: Arsitektur Pengetahuan Kolonial dan Dekonstruksi Historiografi Srivijaya

Historiografi Asia Tenggara kuno, khususnya yang berkaitan dengan kemaharajaan Srivijaya, selama lebih dari satu abad telah didominasi oleh ortodoksi akademik yang menetapkan Palembang sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan. Narasi monolitik ini, yang "ditemukan" dan dikonsolidasikan pada awal abad ke-20, secara konvensional diajarkan sebagai hasil murni dari pencerahan akademis objektif, dipelopori oleh filolog Prancis George Coedès dan didukung secara aklamasi oleh komunitas sarjana Hindia Belanda. Namun, penyelidikan kritis yang mengintegrasikan sejarah politik, analisis ekonomi ekstraktif, dan diplomasi kebudayaan transnasional menyingkap sebuah realitas yang jauh lebih kompleks. Pembentukan paradigma Palembang-sentris bukanlah sebuah proses verifikasi ilmiah yang hampa dari kepentingan kekuasaan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan produk dari sebuah konvergensi struktural yang beroperasi secara laten di antara tiga aktor utama pada pergantian abad ke-20: Kerajaan Siam (Thailand), Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dan aparatur pengetahuan Eropa yang direpresentasikan oleh George Coedès.

Laporan penelitian ini mengkaji dan membuktikan tesis "Triangulasi Destruksional"—sebuah kerangka analitis komprehensif yang membedah bagaimana ketiga entitas tersebut secara fungsional berkolaborasi untuk merestrukturisasi, memanipulasi, dan menghapus memori historis maritim Nusantara. Proses ini bermuara pada penyingkiran sistematis terhadap identitas maritim Melayu murni yang secara historis berpusat di wilayah kepulauan thalassokrasi Riau-Lingga dan Semenanjung Malaya. Destruksi historiografis ini terjadi tanpa memerlukan sebuah konspirasi tertulis; ia lahir melalui sinkronisasi kepentingan ontologis, material, dan geopolitik yang saling melengkapi.

Kerajaan Siam, yang tengah berjuang mempertahankan otonominya dari bayang-bayang imperialisme Inggris dan Prancis, membutuhkan legitimasi kebudayaan sebagai pelindung universal Buddhisme di Asia Tenggara. Legitimasi ini membenarkan akuisisi dan ekstraksi artefak-artefak purbakala berskala besar dari Jawa. Di sisi lain, pemerintah kolonial Belanda membutuhkan justifikasi absolut untuk mengekspansi kapitalisme ekstraktifnya. Hal ini diwujudkan dengan membubarkan Kesultanan Riau-Lingga pada tahun 1911 demi melancarkan eksploitasi masif atas mineral strategis (timah dan bauksit) tanpa harus terhalang oleh klaim perlindungan situs cagar budaya atau warisan peradaban. Sementara itu, George Coedès—seorang sarjana Prancis yang berstatus sebagai aparatur negara Siam—membutuhkan kerangka teori monumental berbasis daratan dan prasasti batu untuk mengukuhkan posisinya sebagai otoritas tak terbantahkan dalam disiplin sejarah Asia Tenggara.

Melalui penelusuran mendalam terhadap catatan arsip, korespondensi akademis, dokumentasi pemindahan artefak purbakala, serta sejarah konsesi pertambangan kolonial, laporan ini akan mendekonstruksi anatomi "pencucian sejarah kolonial" (colonial history laundering). Analisis ini membuktikan bahwa penggeseran definisi pusat Srivijaya dari sebuah jaringan kekuasaan laut (thalassokrasi) menjadi entitas agraris-monumental di daratan Sumatra adalah sebuah operasi hegemonik. Operasi ini secara efektif menutupi kekerasan ekstraktif di Riau-Lingga dengan cara memfokuskan "kebesaran sejarah" ke wilayah pedalaman yang secara ekonomi dan politis menguntungkan bagi pelanggengan kapitalisme kolonial.

Bab 1. Semiotika Distraksi dan Pertukaran Material Asimetris: Membongkar Mitos Diplomasi Kultural Siam-Belanda

Untuk memahami fondasi dari arsitektur pengetahuan ini, analisis harus dimulai dengan membongkar lapisan simbolik dari diplomasi kebudayaan abad ke-19, yang beroperasi sebagai tabir bagi ekstraksi artefak material. Relasi diplomatik antara Kerajaan Siam dan pemerintah Hindia Belanda pada periode ini ditandai oleh sebuah asimetri yang ekstrem, yang diwujudkan melalui dua peristiwa kunjungan Raja Chulalongkorn (Rama V) ke Pulau Jawa pada tahun 1871 dan 1896.

1.1. Patung Gajah Perunggu sebagai Instrumen Distraksi Semiotik (1871)

Pada tahun 1871, Raja Chulalongkorn, yang saat itu masih berusia 18 tahun, melakukan kunjungan kenegaraan ke Hindia Belanda (Batavia dan Semarang) serta Singapura. Kunjungan ini merupakan peristiwa bersejarah, menjadikannya monarki Siam pertama yang melakukan perjalanan ke luar negeri di masa damai untuk mempelajari teknologi modern, sistem perkeretaapian, dan tata kelola administrasi Barat. Sebagai tanda itikad baik, manifestasi persahabatan, dan apresiasi atas sambutan dari Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Raja Siam menghadiahkan sebuah patung gajah perunggu kepada kota Batavia.

Patung gajah tersebut ditempatkan secara terhormat di halaman depan gedung museum perkumpulan ilmiah tersebut di Jalan Medan Merdeka Barat. Kehadiran monumen ini sangat mencolok hingga mengubah identitas populer institusi tersebut menjadi "Museum Gajah" (kini Museum Nasional Indonesia). Sebuah patung kembar yang identik juga dihadiahkan kepada pemerintah kolonial Inggris di Singapura, yang ditempatkan di depan Gedung Parlemen Lama.

Dalam kosmologi dan tradisi Siam, gajah—terutama gajah putih—adalah representasi tertinggi dari royalti, kebijaksanaan, dan kekuatan spiritual yang melegitimasi kekuasaan seorang raja penganut Buddha. Namun, dalam lanskap geopolitik kolonial, patung ini berfungsi sebagai instrumen distraksi semiotik. Kehadiran patung ini di jantung ibu kota kolonial Hindia Belanda menciptakan sebuah ilusi pertukaran kultural yang setara dan resiprokal. Patung perunggu ini memukau mata publik Batavia dan seakan menegaskan persahabatan murni antar-kerajaan, sementara secara laten, simbol monumental ini mengalihkan diskursus dari transaksi material asimetris yang terjadi dua dekade kemudian. Siam memberikan sebuah "simbol" perunggu buatan era modern, namun sebagai imbalannya, Siam memperoleh akses tanpa batas untuk

mengambil "substansi" material peradaban kuno Nusantara.

1.2. Ekstraksi Artefak Borobudur dan Jawa Kuno (1896)

Sifat asimetris dari hubungan ini termanifestasi secara nyata pada kunjungan kedua Raja Chulalongkorn ke Jawa pada tahun 1896. Kunjungan yang pada awalnya dideklarasikan sebagai perjalanan tidak resmi untuk pemulihan kesehatan pasca-sakit ini, berubah menjadi operasi akuisisi dan ekstraksi artefak purbakala berskala masif. Raja Chulalongkorn mengunjungi berbagai situs peninggalan Hindu-Buddha, termasuk Yogyakarta, Surakarta, Prambanan, Mendut, dan secara khusus menghabiskan waktu tiga hari di Candi Borobudur di Magelang.

Di Borobudur, Raja Siam tidak hanya melakukan ritual persembahan bunga di stupa utama dan meminta tanda tangannya diukir dengan emas di dinding dalam stupa, tetapi juga memilih artefak-artefak fisik untuk dibawa pulang. Atas persetujuan formal dan izin eksplisit dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda C.H.A. van der Wijck, Raja Chulalongkorn diizinkan untuk membawa apa yang secara historis dideskripsikan sebagai "delapan gerobak" (eight cartloads) mahakarya patung dan relief dari Candi Borobudur. Keputusan pemerintah kolonial ini difasilitasi melalui jalur birokrasi rahasia, sebagaimana didokumentasikan dalam *Besluit* (Keputusan) Algemeene Secretarie tertanggal 16 Oktober 1896, yang menyusul korespondensi antara Gubernur Jenderal dan Residen Yogyakarta pada Juli 1896.

Berdasarkan inventarisasi arkeologis dan catatan sejarah, ekstraksi ini melibatkan objek-objek arsitektural dan teologis paling vital dari peradaban Jawa kuno. Tabel berikut merinci kaliber artefak yang dipindahkan ke Siam:

Kategori Artefak	Lokasi Asal	Spesifikasi Ekstraksi	Lokasi Preservasi Saat Ini
Arca Buddha Utama	Candi Borobudur	Lima (5) arca Buddha utuh berukuran besar dengan detail mudra yang representatif.	National Museum Bangkok dan kuil terkait (seperti Wat Phra Kaew)
Panel Relief Naratif	Candi Borobudur	Tiga puluh (30) keping "batu berbicara" atau fragmen relief dari galeri pertama yang menggambarkan episode Jataka.	National Museum Bangkok
Elemen Arsitektur Sakral	Candi Borobudur	Dua (2) patung singa penjaga, beberapa motif Kala dari tangga, ornamen Makara, dan satu (1) gargoyle (jaladwara) raksasa.	National Museum Bangkok (Ruang Seni Jawa)
Arca Penjaga (Dvarapala)	Area Borobudur	Satu (1) arca Dvarapala berukuran besar yang secara lokal dipercaya sebagai representasi arsitek Borobudur	National Museum Bangkok

Kategori Artefak	Lokasi Asal	Spesifikasi Ekstraksi	Lokasi Preservasi Saat Ini
		(Gunadharma).	
Relief Epik Hindu	Candi Prambanan	Sejumlah panel relief Ramayana yang dipilih dari gudang penyimpanan pemerintah (*gouvernementsloods*) di kediaman Residen Yogyakarta.	National Museum Bangkok
Arca Tantrik/Sinkretis	Candi Singasari	Arca Ganesha raksasa dengan ornamen tengkorak (menandakan elemen Bhairava/Tantrik) yang berukuran lebih besar dari yang dikirim ke Leiden pada 1819, beserta satu Ganesha kecil.	National Museum Bangkok

Tabel 1. Inventarisasi Ekstraksi Mahakarya Purbakala oleh Kerajaan Siam (1896)

Selain persetujuan resmi pemerintah pusat, ekstraksi ini juga melibatkan hadiah antiquarian tanpa persetujuan formal dari elite lokal Jawa, seperti Pangeran Mangkunegara VI di Solo yang menyerahkan empat arca Buddha yang diyakini berasal dari Candi Plaosan. Operasi pemindahan artefak ini awalnya berlalu tanpa protes berarti dari otoritas Belanda di Hindia. Baru tiga tahun kemudian, pada 1899, kemarahan publik mulai mencuat di kalangan pers Hindia Belanda dan Eropa, dengan tokoh seperti mantan jurnalis J.F. Scheltema menyebut peristiwa tersebut sebagai "tahun paling mendatangkan bencana bagi Borobudur," mengecam tindakan pemerintah Belanda yang bermurah hati menghancurkan monumennya sendiri.

1.3. Rasionalisasi Teologis dan Implikasi Geopolitik

Ekstraksi besar-besaran ini bukan sekadar aktivitas kolektor barang antik (antiquarianism) yang pasif. Bagi Kerajaan Siam, mengakuisisi arca-arca Jawa memiliki rasionalisasi teologis yang mendalam. Sebagaimana dicatat, Raja Chulalongkorn menginterpretasikan relasi raja-raja pembangun Borobudur melalui lensa monarki Buddha. Di tengah kepungan imperialisme Barat yang menjatuhkan kekuatan Buddha lainnya di Asia Tenggara, Siam memposisikan dirinya sebagai pewaris tunggal, pelindung (dharmaraja), dan pusat gravitasi Buddhisme regional. Mengambil arca dari Jawa—sebuah wilayah yang dikuasai oleh kolonialis Eropa beragama Kristen dan dihuni oleh mayoritas penduduk Islam—dianggap sebagai tindakan sakral "penyelamatan" relik Buddha ke negara merdeka yang agamanya masih murni.

Bagi pihak Belanda, fasilitasi pengambilan artefak ini melayani kepentingan pragmatisme diplomatik. Memuaskan monarki Siam secara politik membantu Belanda menjaga keseimbangan geopolitik dan stabilitas perbatasan di Asia Tenggara. Namun, tindakan ini menetapkan sebuah preseden ontologis yang krusial: peradaban kuno Nusantara direduksi nilainya menjadi komoditas batu mati yang dapat dipilah, dipisahkan dari konteks

keruangannya, dan divalidasi oleh elite asing. Preseden "sejarah sebagai monumen batu" ini kelak akan menjadi fondasi bagi Coedès untuk menyingkirkan validitas sejarah maritim Nusantara yang berbasis kayu dan armada laut.

Bab 2. Kekosongan Epistemik dan Imperialisme Ekstraktif: Penghancuran Kedaulatan Maritim Riau-Lingga

Sementara diplomasi batu candi memikat perhatian para elit di Jawa dan Siam, di front lain dari Kepulauan Nusantara, pemerintah Hindia Belanda tengah merancang sebuah operasi penguasaan teritorial yang agresif. Fokus dari operasi ini adalah Kepulauan Riau-Lingga, sebuah wilayah kepulauan strategis di mulut Selat Malaka yang menyimpan cadangan mineral tak ternilai. Operasi ekonomi ini menuntut sebuah "kekosongan epistemik"—sebuah historiografi resmi yang harus meniadakan status Riau-Lingga sebagai pewaris pusat peradaban besar, agar eksploitasi mineral dapat berjalan tanpa hambatan hukum perlindungan cagar budaya.

2.1. Pembubaran Thalassokrasi Kesultanan Riau-Lingga (1911)

Kesultanan Riau-Lingga, yang terbentuk sebagai entitas politik independen akibat pemisahan imperium Johor-Riau pasca-Perjanjian London 1824, adalah representasi organik dari model thalassokrasi (kekaisaran maritim) Melayu. Berbeda dengan model kerajaan agraris di pedalaman Jawa yang mengartikulasikan kekuasaannya melalui candi batu, legitimasi dan kekuatan Riau-Lingga bertumpu pada penguasaan rute pelayaran, pergerakan armada kayu, pelabuhan dagang dinamis, dan patronase atas jaringan Orang Laut. Pada abad ke-19, wilayah ini, khususnya Pulau Penyengat, berevolusi menjadi pusat keunggulan intelektual Islam dan pemurnian bahasa Melayu yang dimotori oleh cendekiawan keturunan Melayu-Bugis seperti Raja Ali Haji. Kemandirian intelektual dan ekonomi ini memposisikan Riau-Lingga sebagai kutub otonomi yang membahayakan hegemoni kolonial.

Hingga pergantian abad ke-20, Riau-Lingga dikelola di bawah sistem pemerintahan ganda di mana kekuasaan Sultan (sebagai simbol pemersatu) didampingi oleh Yang Dipertuan Muda (dari faksi Bugis). Namun, sejalan dengan doktrin *Pax Neerlandica*, Belanda menghendaki kontrol mutlak. Pada 1899, Sultan Abdul Rahman II menggabungkan kedua jabatan tersebut ke dalam dirinya, menciptakan sentralisasi kekuasaan yang mengkhawatirkan Batavia. Klimaks dari ketegangan ini terjadi ketika Sultan menolak untuk menandatangani *Korte Verklaring* (Deklarasi Pendek) yang disodorkan oleh pemerintah kolonial—sebuah kontrak politik yang secara *de jure* akan merampas hak kedaulatan ekonomi dan politiknya, menjadikannya sekadar boneka administratif.

Sebagai bentuk perlawanan, Sultan Abdul Rahman II meninggalkan istananya di Pulau Penyengat dan beremigrasi ke Singapura yang berada di bawah yurisdiksi Inggris. Merespons hal ini, pada tanggal 3 Februari 1911, pemerintah Hindia Belanda memakzulkan Sultan secara sepihak *in absentia* dan secara resmi membubarkan Kesultanan Riau-Lingga. Kekuasaan administratif jatuh sepenuhnya ke tangan Batavia pada 1913. Penghapusan sistematis ini bukan sekadar pergantian rezim, melainkan pemenggalan institusi penjaga memori maritim Melayu yang telah berurat-akar selama berabad-abad.

2.2. Rezim Pertambangan: Penemuan Bauksit Bintan dan Eskalasi

Timah Singkep

Penghancuran kedaulatan politik Kesultanan Riau-Lingga pada 1911 merupakan langkah prasyarat bagi imperialisme ekstraktif. Memasuki dekade 1910-an dan 1920-an, transisi global menuju industrialisasi, penerbangan modern, dan kebutuhan perang memicu permintaan eksponensial terhadap logam strategis. Kepulauan Riau merupakan sabuk geologis yang sangat kaya akan timah dan bauksit (biji utama aluminium).

Eksploitasi timah di Pulau Singkep—yang sebelumnya dikelola di bawah otoritas kesultanan sejak 1812—diambil alih dan diekspansi secara masif oleh entitas modal kolonial, memunculkan operasi penambangan tanpa hambatan yang merombak lanskap ekologis dan demografis pulau tersebut secara brutal.

Lebih kritis lagi adalah eksplorasi bauksit di Pulau Bintan, pulau terbesar di gugusan Riau yang lokasinya berdekatan dengan bekas ibu kota Kesultanan di Pulau Penyengat. Pada tahun 1924, perusahaan Belanda NV NIBEM (Nederlandsch Indische Bauxiet Exploitatie Maatschappij) secara resmi mematenkan "penemuan" cadangan bauksit raksasa di Kijang, Pulau Bintan. Untuk melancarkan pembongkaran tanah berskala masif ini, NV NIBEM membutuhkan penguasaan lahan secara absolut. Memasuki tahun 1935, operasi telah berjalan dalam skala industri, dan NIBEM mulai mengekspor komoditas bauksit tersebut untuk menyuplai pabrik-palbrik aluminium di Eropa Barat dan Jepang.

2.3. Keharusan Epistemis: Menghindari Ordonansi Monumen

Bersamaan dengan periode ekspansi kapitalis ini, pemerintah Hindia Belanda juga berada di bawah tekanan "Politik Etis" yang menuntut preservasi budaya. Pada tahun 1913, Belanda secara resmi mendirikan *Oudheidkundige Dienst* (Dinas Purbakala), dan pada tahun 1931 memberlakukan *Monumentenordonnantie* (Ordonansi Monumen), sebuah instrumen hukum yang sangat ketat yang melarang perusakan, ekskavasi ilegal, dan modifikasi lahan pada situs-situs yang diklasifikasikan sebagai warisan sejarah purbakala.

Di sinilah letak kontradiksi dan ancaman terbesar bagi industri kolonial. Jika catatan sejarah kuno mengakui Kepulauan Riau-Lingga, Bintan, atau Semenanjung di sekitarnya sebagai pusat dari kemaharajaan Srivijaya—kekaisaran terbesar di Asia Tenggara—maka seluruh wilayah geografis tersebut berisiko terperangkap dalam status konservasi di bawah *Monumentenordonnantie*. Label "pusat peradaban kuno" akan memberikan landasan hukum bagi para arkeolog untuk menolak konsesi pertambangan NIBEM.

Oleh karena itu, aparatur kolonial memiliki kebutuhan yang sangat mendesak akan sebuah kerangka teori sejarah alternatif. Mereka membutuhkan sebuah justifikasi epistemis yang secara definitif mendegradasi Kepulauan Riau sekadar sebagai "wilayah pinggiran" (periphery) historis, sarang para perompak, atau jalur persinggahan yang kosong dari nilai monumen peradaban. "Kebesaran historis" kemaharajaan kuno harus digeser dan dilokalisir ke daratan Sumatra, tepatnya Palembang, di mana ekskavasi purbakala dan pelestarian sejarah tidak akan bersinggungan apalagi mengganggu mesin ekonomi ekstraktif mineral global. Kebutuhan epistemis kolonial inilah yang secara fungsional terpenuhi dengan kemunculan karya George Coedès.

Bab 3. George Coedès dan Konstruksi Aparatur Pengetahuan Transimperial

Dalam banyak literatur arus utama, George Coedès (1886–1969) kerap dikultuskan sebagai seorang genius epigrafis yang bekerja dalam isolasi laboratorium akademik, yang berhasil merangkai puing-puing prasasti menjadi gambaran utuh kemaharajaan Srivijaya. Namun, mendekonstruksi jejak kelembagaannya membuktikan bahwa Coedès tidak beroperasi di ruang hampa. Ia adalah produk dan agen dari sebuah aparatur pengetahuan transimperial yang mempertautkan institusi kolonial Prancis (EFEO), Kerajaan Siam, dan Dinas Purbakala Belanda.

3.1. Asal-Usul dan Transisi ke Birokrasi Siam

Coedès lahir di Paris pada 10 Agustus 1886 dari keluarga mapan Prancis yang rekam jejaknya dapat ditelusuri hingga kawasan Strasbourg sebelum tahun 1740; nenek moyangnya bekerja di Perbendaharaan Kerajaan, ayahnya adalah seorang bankir, dan kakeknya, Louis-Eugène Coedès, adalah pelukis kenamaan. Kendati terdapat berbagai spekulasi pinggiran yang menyebutnya memiliki darah Belanda atau keturunan emigran Yahudi-Hungaria, catatan genealogi resmi telah membantah rumor tersebut sebagai ketidakakuratan. Signifikansi Coedès dalam operasi pencucian sejarah ini bukan didikte oleh genetika keturunannya, melainkan oleh afiliasi politik dan institusionalnya.

Latar belakang intelektual Coedès terbentuk di l'École pratique des hautes études di bawah payung *École française d'Extrême-Orient* (EFEO). Namun, lonjakan dramatis otoritasnya terjadi justru ketika ia melepaskan statusnya di EFEO dan menandatangani kontrak sebagai pegawai negeri Kerajaan Siam pada 16 Desember 1917. Mulai 1 Januari 1918 hingga 31 Desember 1929, Coedès dipekerjakan penuh waktu oleh Siam, di mana ia menerima gaji tinggi sebesar 1.000 baht per bulan beserta hak pensiun. Ia menduduki posisi strategis sebagai Kurator Kepala di Perpustakaan Nasional Vajiravudh (Watchirayan) menggantikan akademisi Jerman Oskar Frankfurter, dan kelak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Seksi Asing di Royal Institute of Siam (Ratchabanditthayasapha).

3.2. Kolaborasi dengan Pangeran Damrong Rajanubhab

Posisi Coedès di Bangkok mempertemukannya dengan mentor dan pelindung utamanya: Pangeran Damrong Rajanubhab (1862–1943). Pangeran Damrong, saudara Raja Chulalongkorn, adalah bapak historiografi modern Thailand, intelektual paling berpengaruh, pendiri Dinas Purbakala, sekaligus mantan Menteri Dalam Negeri Siam yang sangat berkuasa.

Hubungan antara Pangeran Damrong dan Coedès jauh melampaui birokrasi biasa; mereka adalah arsitek kembar yang merancang kanon "Sejarah Nasional" Siam dan gaya kesenian Asia Tenggara. Pangeran Damrong menggunakan keahlian epigrafis Eropa yang dimiliki Coedès untuk menstrukturisasi masa lalu Siam agar setara dengan narasi peradaban monumental yang dibangun oleh Prancis di Kamboja (Angkor) dan Belanda di Jawa (Borobudur). Sebagai balasan, Coedès mendapatkan perlindungan institusional, akses tak terbatas ke naskah dan prasasti koleksi kerajaan, serta wadah jurnal (*Journal of the Siam Society*) untuk mendiseminasikan teorinya tanpa melalui penelaahan akademis pesaing yang ketat. Mereka berdua secara kolektif merumuskan klasifikasi sejarah purbakala yang menempatkan monumen Buddha sebagai penanda mutlak dari kelayakan sebuah "kemaharajaan agung". Kedekatan mereka termanifestasi dalam perjalanan eksklusif bersama ke Angkor Wat pada tahun 1924, menegaskan penyatuan visi sejarah Siam-Prancis.

3.3. Tesis 1918: Doktrin Palembang dan Mekanisme Konversi Akademik

Hanya beberapa bulan setelah memulai jabatannya sebagai birokrat Siam, pada tahun 1918, Coedès menerbitkan esainya yang mengubah dunia, *"Le Royaume de Çrīvijaya"*, di buletin EFEO. Melalui deduksi filologis yang mencocokkan transkripsi catatan Tiongkok (Sanfoqi/Shilifoshi) dan geografi perjalanan biksu I-Tsing (Yijing) dengan penemuan beberapa batu prasasti pendek di Sumatra Selatan (Kedukan Bukit, Talang Tuwo) serta Semenanjung (Ligor), Coedès mengajukan postulat absolut: bahwa terdapat sebuah kemaharajaan hegemonik bernama Srivijaya yang wilayahnya membentang luas, namun ibu kotanya secara terpusat terletak di Palembang, Sumatra.

Hal yang paling esensial dalam tesis ini bukanlah aspek teknis linguistiknya, melainkan penerimaan dan adopsi kilat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari komunitas ilmiah Hindia Belanda. Sebelum 1918, lokasi dan bentuk negara tersebut sangat kabur dan diperdebatkan. Karya monumental Coedès sengaja disebarluaskan dan didorong ke dalam bahasa Belanda untuk mempercepat penetrasinya ke dalam birokrasi koloni.

Sarjana-sarjana sentral Belanda, khususnya J.Ph. Vogel dan N.J. Krom dari Dinas Purbakala (Oudheidkundige Dienst), yang awalnya tidak memiliki kepastian teoretis, secara mendadak mengadopsi teori tersebut. Pada tahun 1919, Vogel menerbitkan terjemahan dan elaborasi teorinya dalam artikel *"Het Koninkrijk Srivijaya"* di jurnal otoritatif Belanda, BKI (Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde). Puncaknya, pada bulan Desember 1919, N.J. Krom menggunakan pidato pengukuhannya sebagai profesor arkeologi di Universitas Leiden untuk secara formal menginstitusionalkan teori Coedès di Belanda, menelurkan teori tentang "Periode Sumatra" dalam Sejarah Jawa. Krom beralasan bahwa Srivijaya di Palembang dan Dinasti Sailendra yang membangun Borobudur adalah entitas sebangun yang mensuplai energi kebudayaan Buddha Mahayana ke Nusantara.

Konversi spektakuler para pakar Belanda ini dimotori oleh korespondensi intensif lintas-batas antara Coedès, Krom, Vogel, dan W.F. Stutterheim. Tesis Palembang diadopsi bukan karena tumpukan bukti ekskavasi baru (saat itu ekskavasi arkeologis di Sumatra belum masif), melainkan karena teori tersebut menawarkan solusi politik dan geografis yang sempurna: Srivijaya memiliki pusat daratan (Palembang) yang memenuhi kriteria "monumen Buddha" yang diidamkan para arkeolog Eropa, sekaligus secara aman menempatkan lokasinya di luar wilayah proyeksi pertambangan NIBEM di Riau-Lingga.

Bab 4. Sinkronisasi Epistemik: 1928 dan Pertemuan Jaringan Transimperial

Infrastruktur jaringan transimperial ini (EFEO di Indochina, Royal Society di Siam, dan Oudheidkundige Dienst di Hindia Belanda) tidak selamanya beroperasi melalui surat-menyurat, melainkan mencapai pertemuan fisiknya yang paling menonjol pada perayaan kultural di Batavia.

Pada bulan April 1928, *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* merayakan hari jadinya yang ke-150. Undangan peringatan ini dirancang sebagai deklarasi keunggulan peradaban Hindia Belanda. George Coedès diundang bukan sekadar sebagai individu, tetapi secara resmi menjabat sebagai utusan diplomatik yang mewakili dua institusi utama Siam: *Royal Institute of Bangkok* (Ratchabanditthayasapha) dan *Siam Society*.

Dalam perayaan akbar di Batavia ini, Coedès diberikan penghormatan khusus atas kerjanya dalam memformulasikan sejarah Srivijaya. Setelah itu, pemerintah Belanda mengawal Coedès dalam sebuah tur eksklusif ke situs-situs mahakarya Jawa Tengah, utamanya Candi Borobudur dan Prambanan. Di situs-situs ini, Coedès mengobservasi dan mempelajari metode restorasi purbakala tingkat lanjut yang diterapkan oleh Dinas Purbakala Belanda (Oudheidkundige Dienst), khususnya teknik *anastilosis* (rekonstruksi struktural dengan meminimalisir material baru). Pengalaman anastilosis ini dikemudian hari diterapkan secara luas oleh Coedès ketika ia menjabat sebagai Direktur EFEO di Hanoi untuk merestorasi kuil-kuil peninggalan Kerajaan Khmer di Angkor.

Kunjungan tahun 1928 tersebut bukan sebuah tur turis; ini adalah pertukaran hegemonik tingkat tinggi. Siam dan Prancis menyediakan legitimasi literatur dan teks, sedangkan Belanda menyediakan legitimasi arsitektural dan material (metode restorasi batu). Melalui interaksi ini, definisi "peradaban kuno" diseragamkan dalam format yang mengharuskan eksistensi bangunan monumental fisik dan narasi epigrafis tunggal, menyingkirkan model peradaban alternatif.

Bab 5. Benturan Ontologis: Paradigma Batu Siam-Belanda versus Armada Kayu Riau

Dominasi intelektual Coedès-Krom-Damrong melahirkan sebuah bias ontologis yang struktural, yang menghalangi ilmu pengetahuan barat untuk dapat memahami bentuk kekuasaan asli kemaritiman Nusantara.

Aspek Ontologis	Paradigma Kontinental (Siam, Belanda, Coedès)	Paradigma Thalassokrasi (Riau-Lingga, Melayu)
Bentuk Fisik Kota	Kota pedalaman (inland), monumen batu/bata permanen.	Permukiman terapung, kapal-kapal kayu majemuk, tiang pasak.
Basis Ekonomi Utama	Agraris, pajak tanah, delta sungai tertutup.	Pengendalian rute laut (Selat Malaka), upeti dagang, pelayaran niaga.
Sumber Legitimasi	Candi raksasa, dogma prasasti epigrafis batu.	Perjanjian lisan, aliansi genealogis, patronase dengan Orang Laut (angkatan laut alami).
Agama Formal	Institusional (Buddhisme Theravada/Mahayana tersentralisasi).	Sinkretis, fungsional dagang, penyebaran Islam dan kearifan lokal secara komunal.
Lokus Geografi	Dataran Sumatra, Jawa Tengah, Lembah Chao Phraya.	Zona transit pesisir, kepulauan sempit, Riau-Johor-Semenanjung.

Tabel 2. Perbandingan Paradigma Historiografi "Batu" melawan "Kayu"

Bagi sarjana epigrafis berhaluan Prancis-Belanda dan birokrat Siam yang legitimasinya diukur dari kuantitas candi yang direstorasi, gagasan bahwa sebuah kemaharajaan sehebat Srivijaya beroperasi tanpa mendirikan metropolis batu yang luas adalah hal yang tak dapat diterima. Karena seluruh infrastruktur maritim Austronesia (galangan kapal, balai istana kayu, pelabuhan, benteng laut) dibangun menggunakan material organik yang hancur oleh kelembaban tropis,

pusat-pusat thalassokrasi seperti Riau tidak meninggalkan jejak monumen permanen yang memenuhi "standar kelayakan" arkeologi Barat.
Sejarah hanya diakui jika ia berwujud batu. Palembang, dengan sebaran beberapa prasasti awal (Kedukan Bukit) dan arca perunggu, meski bukti permukiman kerdil di awal ekskavasinya, sangat cocok dimasukkan ke dalam cetakan teori monumental. Sebaliknya, tiadanya candi batu di Kepulauan Riau mendiskualifikasi wilayah tersebut dari peta narasi peradaban besar, menjadikannya seolah sekadar hamparan geologis yang "menunggu" untuk ditambang oleh korporasi NV NIBEM. Konsep Riau sebagai penerus atau sentral penguasa Selat Malaka direduksi menjadi mitos lokal (seperti babad) atau direpresi sebagai sekadar narasi pelengkap.

Bab 6. Pemberangusan Akademik: Marjinalisasi J.L. Moens dan Quaritch Wales

Bukti paling nyata bahwa Palembang-sentrisme adalah konstruksi dari faksi kekuasaan—alih-alih kebenaran ilmiah yang bulat—adalah adanya penolakan masif dari para sejarawan lain di era tersebut yang mengajukan teori pusat maritim atau Semenanjung. Suara-suara penentang ini diisolasi, diserang, dan ditekan secara institusional oleh poros Coedès dan Krom.
Salah satu penentangan paling komprehensif datang dari ahli sejarah dan filolog Belanda, J.L. Moens. Dalam risalah panjangnya yang diterbitkan pada tahun 1937 berjudul *"Çrīvijaya, Yāva en Katāha"* di jurnal *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* (TBG), Moens secara metodologis dan filologis mendekonstruksi interpretasi Coedès. Tesis sentral Moens berpijak pada rekonstruksi data bayangan matahari (gnomonik) astronomis dari catatan biksu I-Tsing dan kronik Hsin T'ang-shu, yang secara tegas menempatkan garis lintang ibu kota awal Srivijaya berada lebih ke utara (di Semenanjung Malaya/Muara Takus/Kelantan), bukan di garis lintang Palembang.
Lebih jauh, Moens mengajukan re-interpretasi radikal terhadap prasasti Kedukan Bukit (683 M) yang menjadi pilar teori Coedès. Moens berargumen bahwa prasasti tersebut sama sekali bukanlah maklumat berdirinya ibu kota Srivijaya di Palembang; sebaliknya, itu adalah tugu peringatan penaklukan militer, di mana armada 20.000 pasukan Srivijaya "baru" dari utara datang untuk merebut dan menduduki wilayah Palembang ("Srivijaya lama").
Pandangan Moens tentang sifat Srivijaya yang bergerak secara maritim di wilayah utara ekuator (Maka dan Semenanjung) juga diperkuat oleh sarjana dari luar pengaruh Batavia-Prancis. H.G. Quaritch Wales (1935), arkeolog asal Inggris, melalui penemuan arkeologis di Semenanjung Malaya (Chaiya dan lembah Bujang) menyatakan bahwa titik tumpu kemaharajaan justru bermula dan terpusat di kawasan selat. Demikian pula sejarawan India R.C. Majumdar (1933) yang menekankan sentralitas Semenanjung Malaya dalam mengendalikan maritim.
Karena sarjana-sarjana ini (Moens, Wales, Majumdar) tidak berafiliasi dengan inti mesin birokrasi *Oudheidkundige Dienst* maupun patronase Kerajaan Siam, argumen mereka ditentang secara institusional. Coedès secara terbuka meremehkan dan mendiskreditkan teori Moens, menyebut interpretasi Moens tentang Keling-Malaya sebagai "sebuah cerita yang murni fiksi" (pure fiction), dan menggunakan otoritas mutlaknya—serta dukungan dari aliansi jaringannya—untuk memusnahkan kredibilitas gagasan pusat maritim tersebut. Melalui hegemoni penerbitan di EFEO dan dukungan Bataviaasch Genootschap, teori Palembang memenangkan pertempuran diskursus sejarah dan diajarkan sebagai dogma tak terbantahkan, meminggirkan kemungkinan bahwa peradaban Srivijaya sejatinya adalah thalassokrasi

bergerak yang tak terbatas di satu muara sungai daratan.

Bab 7. "Konspirasi Tanpa Konspirator": Analisis Struktural Konvergensi Kepentingan

Membongkar Triangulasi Destruksional ini tidak berarti menuduh adanya pertemuan rahasia di mana Raja Rama V, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan George Coedès menandatangani sebuah pakta untuk menghancurkan sejarah Riau-Lingga. Dalam kajian sejarah dan sosiologi kritis, fenomena ini beroperasi sebagai sebuah *"Konspirasi Tanpa Konspirator"*. Mekanisme ini terbentuk ketika aktor-aktor otonom, yang digerakkan oleh agenda masing-masing di dalam satu ekosistem geopolitik yang sama, menghasilkan keputusan, teori, dan praktik yang secara natural konvergen pada satu hasil eksploitatif. Keselarasan *epistemic framework* ini diringkas dalam tabel matriks kepentingan berikut:

Aktor Historis	Tujuan Strategis/Institusional	Mekanisme Tindakan Operasional	Konvergensi Hasil Akhir (Historiografis)
Kerajaan Siam (Pangeran Damrong / Rama V)	Membendung imperialisme Barat (Inggris/Prancis) dengan melegitimasi Siam sebagai mercusuar agung kebudayaan Buddha Theravada.	Mengekstraksi arca Hindu-Buddha dari Jawa secara masif (1896); merekrut elit sarjana Barat; mensponsori Royal Society.	Srivijaya dan kemaharajaan Nusantara dibingkai murni sebagai peradaban kuno Buddha berbasis monumen batu, meredam identitas Islam-Melayu.
Hindia Belanda (Pemerintah & Dinas Purbakala)	Mengamankan supremasi fiskal koloni melalui ekstraksi mineral strategis; memadamkan kedaulatan entitas pribumi yang menolak tunduk.	Membubarkan paksa Kesultanan maritim Riau-Lingga (1911); meresmikan konsesi tanah bauksit untuk NV NIBEM (1924) dan monopoli timah Singkep.	Mengkategorikan Riau sebagai "zona historis kosong" (bukan monumen cagar budaya), memastikan operasional pertambangan besar-besaran steril dari hukum preservasi.
George Coedès (EFEO & Royal Society of Siam)	Mencapai supremasi mutlak dan monopoli otoritas akademik atas penulisan sejarah pra-Islam di Asia Tenggara.	Mensintesis rekaman filologis ke dalam satu Doktrin Palembang (1918); menjalin pertukaran anastilosis dan pengetahuan dengan birokrat Batavia (1928).	Doktrin Palembang diinstitusionalkan sebagai dogma yang secara epistemologis menghilangkan urgensi penelusuran thalassokrasi di kepulauan Riau.

Tabel 3. Matriks Struktural: Konvergensi Kepentingan Tanpa Konspirasi

Keberhasilan kolaborasi tak diikrarkan ini mencapai proporsi yang spektakuler. Di ranah diplomasi, hadiah sepasang Patung Gajah perunggu dari Raja Siam bertindak sebagai pengalih perhatian semiotik yang nyaris sempurna, menutup rapat persepsi publik dari kerugian kultural akibat pemboyongan puluhan mahakarya arca dan relief epik Borobudur serta Prambanan ke

Bangkok.
Di ranah akademik dan hukum agraria, sementara kaum intelektual *Bataviaasch Genootschap* dan Dinas Purbakala sibuk memvalidasi prasasti-prasasti batu di Palembang mengikuti kerangka pemikiran Coedès, di kepulauan Riau-Lingga, pengeruk tambang bergerak membongkar lahan secara eksploitatif. Tanpa adanya ancaman undang-undang cagar budaya (*Monumentenordonnantie*) yang melindungi wilayah Riau karena wilayah tersebut secara akademis telah dideklarasikan "hampa sejarah", kapitalisme korporasi NV NIBEM dan PT Timah kolonial melenggang membelah tanah, menyokong kekuatan industri Barat sebelum Perang Dunia meletus. Hukum dan Ilmu Pengetahuan secara tidak langsung bersekutu untuk melayani Modal.

Kesimpulan: Dekolonisasi Historiografi Maritim

Penyelidikan mendalam terhadap interaksi antara Kerajaan Siam, sistem administrasi Hindia Belanda, dan konstruksi teori oleh George Coedès membuktikan bahwa historiografi kemaharajaan Asia Tenggara purba, khususnya ortodoksi Srivijaya yang berpusat di Palembang, sama sekali bukanlah entitas ilmiah yang netral. Historiografi ini merupakan monumen konseptual yang secara organik dipahat oleh hegemoni kolonial dan pragmatisme ekstraktif. Tesis Triangulasi Destruksional terbukti valid: Siam membutuhkan afirmasi teologis monarki Buddha-nya untuk menangkal penjajahan; Belanda membutuhkan keamanan hukum yang absolut dari klaim cagar budaya demi mengeruk timah dan bauksit setelah membinasakan Kesultanan Riau-Lingga (1911); dan Coedès—yang melayani Siam dan beraliansi dengan pakar-pakar Jawa Belanda seperti Krom—menyediakan arsitektur teori tunggal yang merangkum serta menyelesaikan kedua kepentingan politik tersebut dengan memindahkannya ke Sumatera Selatan.
Patung Gajah di Museum Nasional berdiri hari ini bukan sebagai simbol persahabatan murni, melainkan sebagai ironi sejarah—sebuah monumen yang menutupi eksodus massal warisan Jawa ke Siam pada tahun 1896, dan meredam kebrutalan penaklukan teritorial Belanda atas kemaharajaan Melayu maritim. Penolakan atas suara-suara alternatif yang diajukan oleh sarjana seperti J.L. Moens dan Quaritch Wales (yang mengajukan hipotesis asal-usul maritim dan Semenanjung) menunjukkan bahwa aparatur pengetahuan bertindak represif terhadap gagasan yang mengancam keseimbangan narasi penguasa. Standar pembuktian epistemologis "batu candi" yang ditetapkan Eropa membuat kerajaan-kerajaan lautan berwujud armada kayu, permukiman apung, dan jaringan aliansi pesisir lenyap dari definisi peradaban agung.
Membongkar mekanika pencucian sejarah kolonial ini bukan hanya bertujuan mengoreksi lokasi peta di masa lalu, tetapi merupakan sebuah kewajiban akademis dalam rangka dekolonisasi pengetahuan. Narasi historis Asia Tenggara tidak lagi bisa dipelajari tanpa membedah politik ekonomi para penulisnya. Mengembalikan otonomi sejarah pada konsepsi thalassokrasi—di mana lautan, pelabuhan, dan kepulauan strategis bertindak sebagai pusat kekuatan—berarti merehabilitasi dan memulihkan martabat peradaban maritim Austronesia sejati dari tumpukan reruntuhan hegemoni kolonial Barat dan monarki daratan.

Karya yang dikutip

1. Exchange, Protection, and the Social Life of Java's Antiquities, 1860s–1910s (Chapter 2) -

The Politics of Heritage in Indonesia, https://www.cambridge.org/core/books/politics-of-heritage-in-indonesia/exchange-protection-and-the-social-life-of-javas-antiquities-1860s1910s/913EAA5D215DCD474554519A926C0A51 2. Sekilas Mengenal Kesultanan Riau-Lingga, Dihapus Oleh Kolonial ..., https://bertuahpos.com/insight/sekilas-mengenal-kesultanan-riau-lingga-dihapus-oleh-kolonial-belanda-tahun-1911.html 3. YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK STRATEGI KEPOLISIAN DA, https://repository.uir.ac.id/10203/1/177510033.pdf 4. sejarah pertambagan bauksit di kabupaten bintan pada tahun 1924-2014 - Garuda - Garba Rujukan Digital, https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1595911 5. vice of Southeast Asian Studies Jean Baffie1 George Cœdès, https://cdn.angkordatabase.asia/libs/docs/baffie-jss113-coedes-2025.pdf 6. George Cœdès - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/George_C%C5%93d%C3%A8s 7. G. COEDES The Indianized States of Southeast Asia - Angkor Database, https://cdn.angkordatabase.asia/libs/docs/The-Indianized-States-of-Southeast-Asia-by-George-Coedes-z-lib.org.pdf 8. National Museum of Indonesia: One of the oldest and best in Southeast Asia - OBSERVER, https://observerid.com/national-museum-of-indonesia-one-of-the-oldest-and-best-in-southeast-asia/ 9. A treasure of Rama V - Nation Thailand, https://www.nationthailand.com/life/30357783 10. A Royal Treasure: The Javanese Batik Collection of King Chulalongkorn of Siam — Art of The Ancestors | Island Southeast Asia, Oceania, and Global Tribal Art News, https://www.artoftheancestors.com/blog/a-royal-treasure-queen-sirikit 11. Some Treasures at the Museum Nasional, Jakarta - History Delocalized, http://historydelocalized.blogspot.com/2016/03/some-treasures-at-museum-nasional.html 12. Museum Nasional: Unveiling Indonesia's Soul Through History, Culture, and Timeless Artifacts, https://www.wonderfulmuseums.com/museum/museum-nasional/ 13. National Museum of Indonesia - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Indonesia 14. The National Museum of Indonesia Full #walkingaround Museum Nasional [Museum Gajah] - Jakarta - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=gAGDQ6I2Qjc 15. Thai Elephant Statues in Singapore, Jakarta and Ho ... - Siam Society, https://thesiamsociety.org/knowledge-hub/uploads/research/19/6579b24fc4db5.pdf 16. Asal-usul Patung Gajah Yang Jadi Ikon Museum Nasional - Validnews.id, https://validnews.id/kultura/Asal-usul-Patung-Gajah-Yang-Jadi-Ikon-Museum-Nasional-hYM 17. Exchange and the Protection of Java's Antiquities: A Transnational Approach to the Problem of Heritage in Colonial Java | The Journal of Asian Studies, https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-asian-studies/article/exchange-and-the-protection-of-javas-antiquities-a-transnational-approach-to-the-problem-of-heritage-in-colonial-java/B1A5990BFEF0EBC66DFA87B3AACB9B46 18. Borobudur - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Borobudur 19. Ruins of Buddhistic Temples in Prågå Valley—Tyandis Båråbudur, Mendut and Pawon - Project Gutenberg, https://www.gutenberg.org/ebooks/63057.epub.noimages 20. Port and polity of the Malay Peninsula and Sumatra (5 - UNESCO, https://en.unesco.org/silkroad/sites/default/files/knowledge-bank-article/port_and_polity_of_the_malay_peninsula_and_sumatra.pdf 21. Hari-Hari Terakhir Kesultanan Riau Lingga, 1911 - Bintoro Suryo, https://bintorosuryo.com/2025/01/10/hari-hari-terakhir-kesultanan-riau-lingga-1911/ 22. Sejarah Pertambangan Bauksit di Kijang - Ulasan.co, https://ulasan.co/sejarah-pertambangan-bauksit-di-kijang/ 23. A fragmented Provenance Report

regarding Four Buddha heads gifted by Artis in the NMVW and the social lives of Borobudur - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), http://pure.knaw.nl/ws/portalfiles/portal/496432798/RAP_PPROCE_ProvenanceReport_36_Artis Buddhaheads_TM_A_5945until5948_v10_v202203.pdf 24. Returning Southeast Asia's Past: Objects, Museums, and Restitution 9789813251243, 1145105258 - EBIN.PUB, https://ebin.pub/returning-southeast-asias-past-objects-museums-and-restitution-9789813251243-1145105258.html 25. Journal of the Siam Society; 102 - DOKUMEN.PUB, https://dokumen.pub/journal-of-the-siam-society-102.html 26. 'Welcome To Bumi Sriwijaya' or the Building of a Provincial Identity in Contemporary Indonesia - Asia Research Institute, NUS, https://ari.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/10/wps08_102.pdf 27. Southeast Asia's Historical Puzzle | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/833168122/George-C%C5%93des 28. Professor George Coedes- An Appreciation - The Siam Society, https://thesiamsociety.org/wp-content/uploads/1970/03/JSS_058_1j_ObituaryGCoedes.pdf 29. (PDF) George Cœdès à Batavia (1928) - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/398692603_George_Coedes_a_Batavia_1928 30. In the Shadow of George Cœdès: Jean-Yves Claeys and the Mission to Siam (1929) - Angkor Database, https://cdn.angkordatabase.asia/libs/docs/kourilsky-coedes-claeys-jss113-2025.pdf 31. H.R.H. Prince Damrong Rai~tnubhab - Siam Society, https://thesiamsociety.org/wp-content/uploads/1964/03/JSS_052_1c_Griswold_ThoughtsOnCentenary.pdf 32. Damrong Rajanubhab | Reformer, Historian, Educator - Britannica, https://www.britannica.com/biography/Damrong-Rajanubhab 33. 7 Royal Antiquarianism, European Orientalism and the Production of Archaeological Knowledge in Modern Siam - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/297784868_7_Royal_Antiquarianism_European_Orientalism_and_the_Production_of_Archaeological_Knowledge_in_Modern_Siam 34. (PDF) From Buddhist Icons to National Antiquities: Cultural Nationalism and Colonial Knowledge in the Making of Thailand's History of Art - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/259435478_From_Buddhist_Icons_to_National_Antiquities_Cultural_Nationalism_and_Colonial_Knowledge_in_the_Making_of_Thailand's_History_of_Art 35. Prince Damrong's Journey to Angkor a Century Ago - Siam Society, https://thesiamsociety.org/activity/prince-damrongs-journey-to-angkor-a-century-ago/ 36. ogy George Cœdès and Śrīvijaya: From Epigraphy to Archeology - Angkor Database, https://cdn.angkordatabase.asia/libs/docs/manguin-jp-srivijaya-coedes-jss113-2025.pdf 37. Srivijaya - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Srivijaya 38. The Prehistoric Cultures and Historic Past of South Sumatra on the Move (Chapter 5) - The Politics of Heritage in Indonesia - Cambridge University Press & Assessment, https://www.cambridge.org/core/books/politics-of-heritage-in-indonesia/prehistoric-cultures-and-historic-past-of-south-sumatra-on-the-move/476AB06DEFE51AC40CE580146B4DB976 39. The Khmer Empire and the Malay Peninsula - Angkor Database, https://angkordatabase.asia/libs/docs/publications/the-khmer-empire-and-the-malay-peninsula/briggs-funan2.pdf 40. George Cœdès and Śrīvijaya | The Journal of the Siam Society - ThaiJo, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/pub_jss/article/view/290114 41. The Ancient Khmer Empire, https://os.pennds.org/archaeobib_filestore/pdf_articles/APS/1951_41_1_Briggs.pdf 42. (PDF) The Capital of Srivijaya - Academia.edu, https://www.academia.edu/34273392/The_Capital_of_Srivijaya 43. 3 - Transimperial Knowledge Networks and the Research Paradigm of Greater India, https://www.cambridge.org/core/books/visions-of-greater-india/transimperial-knowledge-network

s-and-the-research-paradigm-of-greater-india/842136C064148FD1B5898448C25852AD 44. J. Wisseman Christie State formation in early maritime Southeast Asia; A consideration of the theories and the data In - Semantic Scholar, https://pdfs.semanticscholar.org/a60a/45d52997d04fa4073841c6455fd31d6f86e0.pdf 45. George Cœdès à Batavia (1928) | The Journal of the Siam Society - ThaiJo, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/pub_jss/article/view/290115 46. The Maritime Silk Road - OAPEN Library, https://library.oapen.org/bitstream/id/689adfe3-2dfa-4a0d-b04b-3a5f60cb7fad/9789048552429.pdf 47. Thinking Through Srivijaya: Polycentric Networks in Traditional Southeast Asia - The International Studies Association, http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%202015/Archive/23e81aa1-2e38-42a5-86f5-d95c45e4d9ce.pdf 48. Palembang as Śrīvijaya: THE LATENESS OF EARLY CITIES IN SOUTHERN SOUTHEAST ASIA, https://os.pennds.org/archaeobib_filestore/pdf_articles/AP/1978_19_2_BronsonWisseman.pdf 49. REVIEW ARTICLE - The Siam Society, https://thesiamsociety.org/wp-content/uploads/1974/03/JSS_062_2n_ChandChirayuRajani_ReviewArticleBackgroundToSriVijayaPartII.pdf 50. IN SEARCH OF "HO-LING" - Cornell eCommons, https://ecommons.cornell.edu/server/api/core/bitstreams/c0029fe6-2c13-4563-a69a-94b9736dcf2b/content 51. A Study of Srivijaya, https://toyo-bunko.repo.nii.ac.jp/record/3356/files/memoirs30_01.pdf 52. Revisiting the Bujang Valley: A Southeast Asian entrepôt complex on the maritime trade route | Journal of the Royal Asiatic Society - Cambridge University Press & Assessment, https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-royal-asiatic-society/article/revisiting-the-bujang-valley-a-southeast-asian-entrepot-complex-on-the-maritime-trade-route/D931B87F7F7EA4D96885CA2BBCDD806D